



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD FARKAN JAZULI**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **637973**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.426.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m²/700 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 460.000.000
2. Tanah Seluas 720 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 605.000.000
3. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 495.000.000
4. Tanah Seluas 1139 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, WARISAN Rp. 780.000.000
5. Tanah Seluas 1953 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 965.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m²/18 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 264.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 111.000.000

1. MOBIL, FORD RANGER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000



3. MOTOR, HONDA CRF 150CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.535.800
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.570.285.800
III. HUTANG	Rp.	655.543.543
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.914.742.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.